



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI SUMATERA UTARA  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2023 – 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

### III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	WAKIL KETUA TIM/KETUA KOMISI III/F-P. PAN
2.	Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA KOMISI III/F-P. GERINDRA
3.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	WAKIL KETUA KOMISI III/F-P. NASDEM
4.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
5.	Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
6.	NOVRI OMPUSUNGGU, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
7.	IRJEN. POL. (PURN) DRS. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
8.	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E.	ANGGOTA TIM/F-P. GOLKAR
9.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	ANGGOTA TIM/F-P. GOLKAR
10.	Dr. ROMO H.R MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum.	ANGGOTA TIM/F-P. GERINDRA
11.	MUHAMMAD RAHUL	ANGGOTA TIM/F-P. GERINDRA
12.	H. TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., L.L.M.	ANGGOTA TIM/F-P. NASDEM
13.	H. HERU WIDODO, S.Psi.	ANGGOTA TIM/F-PKB
14.	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.	ANGGOTA TIM/F-P. DEMOKRAT
15.	H. SANTOSO, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P. DEMOKRAT
16.	H. M. NASIR DJAMIL, M.Si.	ANGGOTA TIM/F-P. PKS
17.	MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P. PAN

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

### IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 8-12 Desember 2023 di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara.
3. Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara

5. Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

#### **ANGGARAN**

##### *Pagu Anggaran*

Kegiatan Polda Sumatra Utara pada tahun 2023 secara umum dapat terdukung dari pagu anggaran 2023. Adapun jumlah dukungan pagu anggaran tahun 2023 yang diterima polda sumut adalah sebesar Rp.2.619.652.501.000 (dua triliun enam ratus sembilan belas miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah). Di mana Polda Sumut hingga pada tanggal 11 Desember 2023 dapat melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.442.085.768.848 (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 93,22%.

##### *Dukungan Anggaran yang Dibutuhkan*

Mengacu pada realisasi anggaran tahun 2023, ditemukan kekurangan anggaran Polda Sumatra Utara, yaitu :

1. Makan tahanan T.A 2023 jajaran Polda Sumut sebesar Rp.3.996.904.000,-
2. Perawatan tahanan T.A 2023 jajaran Polda Sumut sebesar Rp.713.021.000,-
3. Lidik sidik tindak pidana umum T.A 2023 jajaran Polda Sumut sebesar Rp.6.540.417.000,-
4. Lidik sidik tindak pidana narkoba T.A 2023 jajaran Polda Sumut sebesar Rp.9.556.912.000,-

Sehingga berdasarkan data biro rencana Polda Sumatera Utara kekurangan di akhir tahun 2023 sebesar Rp. 20.807.254.000,-

Polda Sumut saat ini sedang melaksanakan Operasi Mantap Brata tahun 2023 yang dilaksanakan selama 74 hari, dan didukung oleh Dipa pengamanan pemilu tahun 2023 sebesar Rp.41.733.260.000. Di mana telah diserap sebesar Rp.7.949.762.000. Adapun sisa dari anggaran tersebut saat ini berada di rekening satker dan akan digunakan sesuai tahapan pemilu di 2023. Sedangkan untuk alokasi anggaran

pengamanan pemilu tahun 2024 Polda Sumut menerima anggaran sebesar Rp.40.840.505.000,-

## **PENGAWASAN**

### *Evaluasi Penanganan Perkara*

Pada tahun 2023, hingga tanggal 10 Desember 2023, Polda Sumatera Utara telah berhasil menyelesaikan 68,18% dari total perkara yang dilaporkan. Adapun perinciannya, terdapat 39.212 crime total, dan sebanyak 26.735 perkara telah diselesaikan (crime clearance). Khususnya pengungkapan narkoba, pada tahun 2023 Polda Sumut berhasil mengungkap 82,4% dari total 5.052 kasus yang ada dengan 4.163 kasus yang diselesaikan. Adapun Polda Sumut dari 12 September 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 berhasil menangkap sejumlah 2.254 tersangka, dan dari pengungkapan tersebut, barang bukti yang berhasil disita adalah sebanyak 267,48 kg sabu; 361,09 kg ganja; 395.063 pohon ganja dan 6.244 pil 12 ecstasy. Bila dikonversikan, pengungkapan Polda Sumatera Utara telah berhasil menyelamatkan lebih dari 2.884.957 (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) jiwa generasi penerus. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pengungkapan narkoba berkorelasi terhadap turunnya gangguan kamtibmas di wilkum Polda Sumut, yaitu sebanyak 4%. Untuk itu pengungkapan narkoba bukanlah suatu operasi kepolisian, namun atas nama kemanusiaan Polda Sumut berkomitmen untuk menjadikan pengungkapan narkoba sebagai kegiatan rutin kepolisian yang wajib dilaksanakan setiap harinya.

### *Tindak Pidana Menonjol*

Berdasarkan data tahun 2023, dari sejumlah 39.212 perkara yang dilaporkan, sebanyak 5.569 kejadian merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). Dan hal inilah yang membuat kejadian pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi suatu kejadian yang menonjol di wilkum Polda Sumut. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus pembobolan mesin ATM antar provinsi dengan menggunakan mesin las, dimana 5 tersangka berhasil dibekuk dan sudah dilakukan tahap 2 ke pengadilan kab. Tapanuli, sementara 2 tersangka masih dalam penyelidikan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun beberapa kasus lain yang menarik perhatian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penanganan pencurian ringan di Simalungun

2. Penanganan kasus begal
3. Pelaku ujaran kebencian dijerat pasal berlapis

#### *Evaluasi fungsi penegakan hukum di tahun 2023*

1. Berdasarkan data, bahwa dari 39.212 perkara yang dilaporkan ke Polda Sumut dan jajaran, secara kuantitatif jenis kejahatan terorganisir dengan crime total terbesar adalah kejahatan narkoba yaitu sebanyak 5.052 perkara. Polda Sumut dalam penanganan jaringan narkoba melibatkan langkah-langkah seperti kampanye penyuluhan, penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi pengguna, kerjasama internasional, penguatan hukum, pemberdayaan masyarakat, penyitaan aset, pemanfaatan teknologi dan intelijen, penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi erat antar lembaga pemerintah dan sektor swasta. Pendekatan terpadu ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan narkoba secara holistik.
2. Pendekatan restoratif dalam sistem hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021, merupakan strategi yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Dengan memperkenalkan konsep dasar restorative justice, pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab. Tujuan implementasi restorative justice yang diatur dalam regulasi ini mencakup pembentukan hubungan positif antara pelaku, korban, dan kelompok. Polda Sumut dalam hal ini mengedepankan keadilan restoratif pada fungsi reskrim dengan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Sepanjang tahun 2023 pada periode januari sampai dengan desember 2023 Polda Sumut telah melaksanakan keadilan restoratif dengan total 8.388 kasus, selanjutnya berdasarkan jenis kasus terbanyak dilakukan keadilan restoratif oleh polda sumut yakni tipiring dan perselisihan antar warga.
3. Pada tahun 2023, dari 13 kasus korupsi Polda Sumut telah berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan dan aset negara serta kerugian masyarakat dengan total aset yang disita sebesar Rp.60.251.624.013,52 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga belas koma lima dua rupiah). Dengan satker yang melakukan penyelamatan tertinggi yaitu ditreskrimsus Polda Sumut sebesar Rp.22.961.413.570,52 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu

lima ratus tujuh puluh koma lima dua rupiah). Sedangkan untuk polres jajaran sebesar 17 sebesar Rp.37.290.210.443,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). Selain itu dalam rangka penyelamatan aset negara, Polda Sumut membantu (dengan cara pengamanan dan verifikasi) satgas BLBI yang melakukan kegiatan penyitaan atau penguasaan fisik aset properti eks bdl/eks BPPN/eks BBI pada 7 titik di wilayah Sumut, dengan total aset: tanah 85.176 m<sup>2</sup>, bangunan 13.213 m<sup>2</sup>, sehingga estimasi nilai keseluruhan adalah rp.228.159.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Aset tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal kekayaan negara, dan menjadi prioritas penanganan oleh satgas BLBI.

#### *Kesiapan Polda Sumut dalam pengamanan Pemilu 2024*

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Polda Sumatera Utara melaksanakan "Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024". Pada pemilu di Sumatera Utara tercatat daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 10.853.940 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh) orang pemilih tetap yang siap memberikan suara. Pada penyelenggaraan pemilu, kepolisian juga melaksanakan kegiatan cooling system dengan tujuan mencegah potensi kerawanan dan menjaga situasi tetap kondusif melalui berbagai kegiatan preemtif, seperti sosialisasi dan pendekatan komunitas yang diwujudkan dengan kegiatan safari subuh, Jumat curhat, Minggu kasih, deklarasi pemilu damai dan kegiatan lainnya.

Polda Sumatera Utara menyiapkan kekuatan sebanyak 12.877 pers Polri dan telah mendata 45.884 TPS, dengan 44.439 TPS dianggap kurang rawan, 1.235 TPS rawan, 162 TPS rawan tinggi, dan 48 TPS mendapatkan perhatian khusus tersebar di 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, dan 6.110 desa/kelurahan.

#### *Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024*

Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sertaantisipasi gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lintas selama perayaan natal 2023 dan tahun baru 2024 akan didirikan 102 pos pengamanan dan 75 pos pelayanan serta 12 pos terpadu pada 7 rayon yang telah ditetapkan di 29 satwil jajaran Polda Sumut. Adapun objek prioritas pengamanan sebanyak 10.441 titik lokasi dengan rincian sebagai berikut : gereja : 9.868 lokasi, terminal : 26 lokasi, pelabuhan : 25 lokasi,

bandara : 5 lokasi • stasiun kereta api : 29 lokasi, pusat belanja : 154 lokasi 33, objek wisata : 289 lokasi, tempat pergantian tahun : 45 lokasi, dan jalur jalan utama : 5 pos.

## **PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**

### **ANGGARAN**

#### *Pagu Anggaran*

Pada tahun 2023 pagu anggaran pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebesar Rp. 400.931.885.000,- Hingga 30 November 2023 realisasi anggaran telah mencapai Rp.353.918.435.447 atau 88,27%.

#### *Pagu Tahun Anggaran 2024*

Untuk tahun 2024 pagu alokasi Kejaksaan Tinggi Sumut dan wilayah adalah sebesar Rp.422.162.249.000,- yang terdiri dari :

1. Program penegakan dan pelayanan hukum : Rp.47.797.281.000,-
2. Program dukungan manajemen : Rp.374.364.968,-

Beberapa catatan dari pagu tahun 2024 tersebut :

- Mengalami Peningkatan sekitar 9 % dari Anggaran tahun 2023
- Kenaikan tersebut terdapat pada Anggaran Dukungan Manajemen yaitu Belanja Pegawai akibat dari Kenaikan Gaji PNS sebesar 8% dan Penambahan Belanja Operasional Layanan Perkantoran
- Terdapat Anggaran Pembangunan Kantor Baru Lanjutan dari KN Samosir dan KN Padang Lawas
- Terdapat beberapa kegiatan baru pada tahun 2024 yaitu, Pemantauan Pemilu, Kampanye Anti Korupsi dan Perhitungan Kerugian Negara pada seluruh Satuan Kerja yang berada di wilayah KT Sumatera Utara.

### **PENGAWASAN**

#### *Evaluasi Fungsi Penegakan Hukum tahun 2023*

Rekapitulasi penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2023 dan data penyelamatan keuangan negara pada Bidang Tindak Pidana Khusus Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara : Penyelidikan 225 perkara, penyidikan 131 perkara, penuntutan 194 perkara dan eksekusi 142 perkara.

Adapun Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara pada Bidang Tindak Pidana Khusus wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2023, diantaranya :

- Tahap Penyelidikan : Rp. 4,206,414,233,-
- Tahap Penyidikan : Rp.12,292,456,901,-
- Tahap Penuntutan : Rp. 8,519,637,168,-
- Tahap Eksekusi (UP) : Rp. 11.061.177.789,-

*Kajian yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi potensi kerugian negara atau penerimaan negara*

Beberapa kajian yang dilakukan adalah :

1. Monitoring proyek-proyek strategis nasional yang didalam pembangunannya tidak dilakukan secara baik dan benar didalam pembangunan nasional pada daerah;
2. Melakukan penelusuran aset (aset tracing);
3. Melakukan penelusuran terhadap kegiatan-kegiatan yang di audit dan masuk kategori keuangan Negara;
4. Meningkatkan hubungan dengan stakeholder agar tetap berkoordinasi terkait hasil audit penghitungan keuangan Negara apabila terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi kerugian Negara;
5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran keuangan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti korporasi, pihak swasta ataupun individu yang merugikan keuangan negara dan mengurangi penerimaan negara ;

*Kendala dan hambatan yang dihadapi*

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi secara nyata di lapangan, yaitu :

- Dalam melakukan penanganan kasus terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan dalam memerangi mafia hukum dan lainnya.
- Proses yang lama dan panjang dalam mendapatkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Instansi terkait yang mengakibatkan penyidikan memakan waktu yang lama. Selain itu dalam beberapa hal terdapat kurangnya Sumber Daya Manusia/SDM (Auditor) di Daerah yang berpengalaman dan bersertifikasi dalam melakukan audit investigasi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi.



- Ketika dilakukan asset tracing banyak asset yang sudah dilakukan layering dan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain, sehingga menghambat untuk dilakukan penyitaan.
- Kurangnya kerjasama antar penegak hukum dalam berkoordinasi terkait adanya celah mafia hukum yang ditemukan
- Minimnya anggaran tidak sebanding dengan penanganan perkara atas pengaduan laporan masyarakat.
- Letak kondisi geografis kabupaten/kota yang cukup jauh dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik dan sarana prasarana yang kurang memadai
- Jaksa baru yang ditempatkan pada Pidana Khusus belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pidana Khusus sehingga masih kurangnya pengalaman dalam penanganan perkara Pidana Korupsi

*Langkah-langkah untuk memerangi mafia hukum atau mafia lainnya*

Adapun langkah-langkah yang nyata untuk memerangi mafia hukum atau mafia lainnya yang memanfaatkan celah hukum, yaitu :

- Memberikan penerangan secara jelas kepada masyarakat tentang hukum terutama terkait tindak pidana korupsi.
- Memperbanyak sosialisasi pada wilayah hukum satuan kerja terkait pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak mafia hukum.
- Memberikan sanksi/hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana (efek jera) dan preventif bagi orang lain.
- Koordinasi/kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum

Upaya & data penanganan perkara melalui restoratif justice dan rehabilitasi sosial dan medis bagi pengguna narkoba

- Pada periode 1 januari 2023 sampai dengan 30 november 2023 kejaksaan tinggi sumatera utara telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara.
- Jumlah rumah restoratif justice : 57 (lima puluh tujuh), Balai Rehab Narkoba : 1 (satu).
- Perkara restorative justice: Oharda = 113, Kamnegtibum & TPUL = 27 jumlah 140.

- 1 (satu) buah Balai Rehabilitasi yang bernama Balai Rehabilitasi Adhyaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang berada di Jalan Bojonegoro A Desa Sidodadi Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Kendala dalam proses restorative justice (RJ) :

- Jumlah anggaran kegiatan Restorative Justice yang sangat minim, sementara jumlah-jumlah perkara yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa terkait penerapan Restorative Justice di lingkungan masyarakat sangat banyak
- Tingkat kesadaran atau pemahaman masyarakat yang kurang memahami dan masih adanya masyarakat yang acuh padahal penerapan RJ merupakan proses pendekatan Restorative dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak.

*Sinergisitas dan kolaborasi melalui pemahaman bersama dalam forum sentra gakkumdu dan kesiapan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu*  
Sinergisitas dan kolaborasi melalui pemahaman bersama dalam forum sentra gakkumdu :

1. Membentuk Tim GAKKUMDU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi antara anggota Tim GAKKUMDU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Polri dan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dalam menghadapi Pemilu 2024.
3. Menunjuk beberapa orang Jaksa untuk menjadi narasumber dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran tindak pidana pemilu.
4. Meningkatkan kapasitas Jaksa dengan mengikutsertakan Jaksa Tim GAKKUMDU dalam Diklat Terpadu Tindak Pidana Pemilu di Bandiklat Kejaksaan RI.
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi sentra GAKKUMDU di Kantor Bawaslu Provindi Sumatera Utara
6. Melaksanakan Supervisi dan Monitoring sentra GAKKUMDU Propinsi Sumatera Utara.

Kesiapan kejaksaan dan perencanaan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu :

1. Mempersiapkan sdm (pendidikan dan pelatihan ) jaksa untuk menanganai perkara tindak pidana Pemilu dan JPN untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu .
2. Membuat posko pemilu di masing -masing kantor kejaksaan
3. Mendeteksi lanjut kesiapan dan langkah strategis mengantisipasi indeks kerawanan pemilu serentak dengan melakukan pemetaan mendeteksi ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan
4. Mensosialisasikan dan menghimbau serta mengajak asn agar tetap netral dan bijak bermain medsos supaya tidak gampang terpancing berita hoak .
5. Melakukan pendataan dan rekapitulasi daerah pemilihan anggota dprd provinsi sumatera utara pada pemilu tahun 2024 .
6. Melakukan pendataan dan rekapitulasi daftar pemilu sementara (DPS) pemilihan umum 2024 di wilayah Sumatera Utara
7. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu yang mencerminkan upaya kolaboratif untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilu 2024.

## **PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

### **ANGGARAN**

#### *Pagu Anggaran*

Pagu anggaran Kanwil Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 849.992.828.000,-

Hingga akhir November 2023 realisasi telah mencapai Rp. 718.115.632.533 atau sekitar 84,48 persen.

#### *Kebutuhan Anggaran tahun 2023*

Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan :

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia - Peremajaan Gedung (Rp. 134.610.000,-)
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan - Peremajaan Gedung (Rp. 148.200.000,-) terealisasi 23 November 2023 Rp.142.607.872,- sisa Rp.7.332.128,- (95,11%) - Pemeliharaan Halaman Kantor Rp.1.740.000,- terealisasi 23 November 2023 Rp. 700.000,- sisa Rp. 1.040.000,- (40,23%)
3. Rumah Detensi Imigrasi Medan - Pemindahan Lokasi Tanah dan Bangunan (Rp. 42.016.000.000,-)

## **PENGAWASAN**

### *Evaluasi strategi dan kebijakan untuk mengurangi overcrowding*

Hal-hal yang menjadi catatan terhadap evaluasi strategi dan kebijakan untuk mengurangi overcrowding adalah :

1. Melakukan pemetaan terhadap kapasitas riil hunian dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kapasitas maksimal hunian, dimana data tersebut menjadi dasar untuk melakukan pemindahan narapidana.
2. Memindahkan (redistribusi) narapidana pada Lapas/ Rutan yang sudah mengalami overcrowded ke Lapas/ Rutan yang relative dapat menampung narapidana, namun di lapangan masih banyak dijumpai transportasi (biaya) yang tidak memadai berdasarkan anggaran yang tersedia ketika melakukan pemindahan narapidana/ tahanan ke UPT tujuan dengan jarak yang terlalu jauh.
3. Mengoptimalkan program Pembebasan Bersyarat (PB), 3 Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
4. Memperkuat kelembagaan, sarana dan prasarana, serta meningkatkan kemampuan SDM namun kurangnya anggaran sehingga tidak dapat menganulir pemenuhan hak WBP terhadap program kemandirian yang akan diberikan kepada WBP.
5. Meningkatkan kerjasama dan tindak lanjut dengan penegak hukum (pihak eksternal) terkait pencegahan dan pengendalian dalam mengatasi overcrowded.
6. Terdapat WBP yang menolak untuk di pindahkan karena sudah merasa nyaman.
7. Lambatnya turun eksekusi/vonis dari pengadilan yang diterima oleh pihak Lapas/Rutan
8. Sosialisasi pihak Bapas ke pada Lapas / Rutan terkait Restoratif Justice yang ada di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang.
9. Meningkatkan POKMASLIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) untuk melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap WBP di 8 Lapas/Rutan atau klien yang berada di bawah Bapas.

### *Kebijakan terkait Pemilu*

Kebijakan dalam pemenuhan hak WBP terkait Pemilu 2024 :

1. Melakukan kerjasama dengan Disdukcapil terkait pemadanan data, sinkronisasi dan perekaman data WBP

2. Kanwil telah melakukan kerjasama dan penandatanganan kerjasama dengan Disdukcapil dan PMD provinsi, KPU provinsi dan Dukcapil kabupaten/kota dan bawaslu guna memastikan terpenuhi hak politik warga binaan dalam pemilu.

*Data Penghuni dan Petugas*

Penghuni dan Petugas Lapas/LPKA/Rutan Sumatera Utara Per 08 Desember 2023 :

Tahanan	: 7.578
Narapidana	: 24.427
Total penghuni	: 32.005
Jumlah petugas/pegawai	: 3.146
Kapasitas penghuni	: 14.070

*Evaluasi pelaksanaan fungsi Keimigrasian, yakni dalam pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing, maupun kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dan menindak permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Illegal*

Dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing atau tenaga kerja asing jajaran Imigrasi Sumatera Utara memiliki pegawai sebanyak 91 orang yang berada pada seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian serta didukung oleh sarana berupa kendaraan operasional pengawasan sebanyak 11 kendaraan yang berstatus BMN dan sewa.

Dalam melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, jajaran Imigrasi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat tim pengawasan orang asing (TIMPORA) sebanyak 23 kegiatan serta operasi gabungan sebanyak 17 kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Imigrasi Sumatera Utara dari Januari s.d. 30 November 2023 telah berhasil menindak sebanyak 100 orang asing yang diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pen deportasian dan dengan pelanggaran tertinggi adalah penyalahgunaan izin tinggal dan over stay.

*Upaya untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan layanan publik dan kepatuhan hukum masyarakat, antara lain paspor atau dokumen keimigrasian, hak kekayaan intelektual, administrasi hukum, maupun bantuan hukum.*

1. Administrasi Hukum. Menghadirkan aplikasi SIPOLTAK (sistem pelaporan, pemeriksaan dan pengawasan melekat kenotariatan secara online); pembentukan loket layanan pendaftaran perseroan perorangan dengan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama.
2. Kekayaan Intelektual. Mengevaluasi MoU dan PKS yang telah dilaksanakan serta mendorong Kabupaten/Kota yang belum melakukan MoU dan PKS terkait Layanan KI untuk segera dilaksanakan; Implementasi dari MoU dan PKS, Kanwil Sumatera Utara melakukan Inovasi dengan membentuk Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) Sekolah.
3. Keimigrasian. Kanim Kelas I TPI Polonia menggelar rapat pengawasan orang asing (berkolaborasi dengan Bawaslu); Kanim Kelas I TPI Polonia bekerja sama dengan Polonia Sky Park Medan dalam pembentukan Imigrasi Polonia Medan Layanan Sabtu Paspur Kita (SI POLAN LASAK) dan akan bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk membentuk Pojok Imigrasi (Immigration Corner): Pembentukan Kantor Imigrasi baru di Mandailing Natal dan Nias, dan lain-lain.

*Evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum di daerah.*

Kendala dan permasalahan yang masih dihadapi :

- Masih terdapat beberapa daerah yang belum melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di dalam menyusun produk hukum daerah termasuk kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah.
- Terdapat beberapa perancang peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan di Kantor Wilayah.

Langkah-langkah strategi :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi Sumatera Utara, baik kepada Kepala Daerah maupun Pimpinan DPRD;
2. Koordinasi dengan Ditjen PP sebagai instansi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam mendapatkan satu data perancang perundang-undangan baik dikantor wilayah maupun yang ada di Pemerintahan Daerah;
3. Menyelesaikan seluruh permintaan perngharmonisasi produk hukum daerah yang telah di mohonkan oleh daerah ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara;

4. Memaksimalkan anggaran yang masih ada dengan melakukan revisi dengan mempedomani keberhasilan dan kegagalan pada kegiatan dan anggaran sebelumnya.

## **PENJELASAN KEPALA BNNP SUMATERA UTARA**

### **ANGGARAN**

#### *Pagu Anggaran*

Pagu anggaran BNN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar Rp. 23.962.096.000, dengan realisasi penyerapan anggaran (per 01 Desember 2023) sebesar Rp. 22.577.149.477 (94,22%).

Total pagu anggaran BNN Provinsi Sumatera Utara beserta 15 BNN Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar Rp. 54.645.187.000, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar (per 01 Desember 2023) Rp. 50.651.780.614 (92,69%).

#### *Kebutuhan Anggaran*

Untuk meningkatkan efektivitas operasi penindakan dan pencegahan, kebutuhan tambahan anggaran di beberapa area, diantaranya:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia
2. Teknologi dan Peralatan
3. Program Rehabilitasi
4. Kolaborasi dan Koordinasi

### **PENGAWASAN**

#### *Pelaksanaan tugas BNNP selama tahun 2023 di Bidang Penindakan*

- Selama periode Januari sampai dengan November tahun 2023, BNN Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang meresahkan masyarakat. Penyelidikan yang telah dilakukan menghasilkan capaian yang cukup signifikan, dengan jumlah kasus sebanyak 89 kasus yang melibatkan 119 orang tersangka, yang terdiri dari 115 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
- Kemudian BNNP Sumatera Utara telah berhasil melakukan pemusnahan 2 (dua) titik lokasi lahan ganja yang terletak di Wilayah Perbukitan Tor Sihite, Desa Rao-

Rao Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Operasi ini merupakan langkah signifikan dalam upaya memberantas ladang ganja yang meresahkan masyarakat. BNNP Sumatera Utara telah melakukan pemantauan dan penyelidikan yang intensif terhadap wilayah tersebut. Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan adanya dua lokasi ladang ganja yang luasnya mencapai ± 3 hektar. Petugas menemukan lebih dari 30.000 batang ganja yang ditanam dengan rapi di kedua ladang tersebut. Pemusnahan ganja dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Operasi pemusnahan ini bukan hanya merupakan bentuk penindakan tegas terhadap peredaran narkoba, tetapi juga sebagai pesan keras bahwa aparat penegak hukum tidak akan memberi toleransi terhadap kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, BNNP Sumatera Utara berharap dapat memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah tersebut dan sekaligus melibatkan masyarakat untuk mendukung upaya tersebut demi keamanan bersama.

- Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNNP Sumatera Utara berhasil memetakan dengan cermat 4 (empat) peta jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayahnya. BNNP Sumatera Utara berhasil merinci dan memetakan jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah perkotaan, termasuk jalur distribusi, titik penyimpanan, dan individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ini.

#### *Kendala yang dihadapi*

1. Keterbatasan Personil BNN memiliki 16 satuan kerja di wilayah Sumatera Utara dengan jumlah personil 326 orang, yang terdiri dari personil ASN berjumlah 263 orang, personil POLRI berjumlah 63 orang. Menurut Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/888/XI/KA/KP.07.00/2022/BNN Tentang Daftar Nama, Kelas, dan Formasi Jabatan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, menjelaskan bahwa daftar susunan pegawai untuk BNN Provinsi Sumatera Utara dan 15 BNN Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara berjumlah 1.263 orang yang terdiri dari ASN dan POLRI. Dari jumlah personil yang ada sekarang ini, hanya memenuhi 23,4% dari total kebutuhan personil.
2. Keterbatasan anggaran Tahun 2023, BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten/Kota memiliki total pagu sebesar Rp. 54.645.187.000,00. Hal ini



membuat pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) masih terbatas, terutama kemampuan pembiayaan layanan rehabilitasi di Sumatera Utara

3. Keterbatasan Struktur Organisasi Dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, baru terbentuk 15 satuan kerja BNN Kabupaten/Kota. Dengan tingkat prevalensi yang tinggi, maka selayaknya dapat membentuk BNN Kabupaten/Kota baru untuk menurunkan tingginya penyalahgunaan dan peredaran gelap di Sumatera Utara.
4. Keterbatasan Gedung Kantor BNN mempunyai gedung kantor di wilayah Sumatera Utara sebanyak 6 unit gedung, yaitu BNNP Sumatera Utara, BNNK Deli Serdang, BNNK Langkat, BNNK Pematangsiantar, BNNK Asahan, BNNK Mandailing Natal. Untuk BNN Kabupaten/Kota yang belum mempunyai gedung kantor melakukan pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah dan bahkan 3 BNNK lainnya - 8 - melakukan sewa gedung kantor, yaitu BNNK Serdang Bedagai, BNNK Gunungsitoli dan BNNK Labuhan Batu Utara.

Upaya untuk mengedepankan pendekatan kesehatan (rehabilitatif) :

1. Ketersediaan Lembaga Rehabilitasi
2. Deteksi dini melalui test urine
3. Program Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL)
4. Program pasca rehabilitasi

*Upaya yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera*

Upaya yang dilakukan selanjutnya untuk menurunkan penyalahgunaan narkoba secara signifikan dan menimbulkan efek jera, diantaranya:

1. Melakukan razia dalam rangka kegiatan extra ordinary pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebanyak 97 kali, hasil pelaksanaan kegiatan ini mengidentifikasi 322 orang positif narkoba. Razia dilaksanakan pada kawasan rawan narkoba seperti warnet, hotel, tempat hiburan malam, kampus dan lain-lain.
2. Melakukan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka kegiatan extra ordinary dilingkungan instansi pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat berhasil mengidentifikasi 114 orang positif narkoba.

### *Program Pre-Emtif*

Efektifitas program Informasi dan Edukasi yang dilakukan BNNP Sumatera Utara melalui program Pre-Emtif antara lain:

1. Penyelenggaraan program ketahanan diri remaja. BNNP Sumatera Utara melakukan pengukuran daya tangkal remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun Indikator Informasi dan Edukasi adalah Indeks Ketahanan Diri Remaja. Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.
2. Penyelenggaraan program ketahanan keluarga Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Program ini bertujuan membangun hubungan keluarga yang sehat dan mendukung. Ini dapat mencakup pelatihan untuk orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentang risiko penyalahgunaan narkoba dan cara mendukung perkembangan anak-anak. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serta sebaran informasi yang diterima masyarakat menghasilkan nilai indeks ketahanan keluarga di tahun 2022 sebesar 83,929 (tinggi).
3. Pemetaan pada program pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memetakan kawasan rawan narkoba, potensi kawasan rawan, dan kelompok sasaran yang menjadi target dari program pemberdayaan masyarakat. Pemetaan kawasan rawan narkoba adalah upaya penggambaran masyarakat yang tinggal di kawasan yang diidentifikasi sebagai rawan narkoba. Pemetaan tersebut bertujuan untuk mengurai masalah social di dalamnya melalui pengumpulan data dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui proses wawancara menggunakan kuesioner (instrumen) mengenai delapan indikator pokok dan lima indikator pendukung. Pengumpulan data tersebut adalah upaya untuk menyimpulkan kategori kerawanan narkoba, yaitu bahaya, waspada, siaga dan aman. Indikator karakteristik pokok berjumlah delapan, yaitu (1) kasus kejahatan narkoba, (2) angka kriminalitas/aksi kekerasan, (3) bandar pengedar narkoba, (4) kegiatan produksi narkoba, (5) angka pengguna narkoba, (6) barang bukti narkoba, (7) titik masuk narkoba, dan (8) kurir narkoba. Indikator karakteristik pendukung berjumlah lima, yaitu (1) banyak lokasi hiburan,

(2) tempat kos dan hunian dengan privasi tinggi, (3) tingginya angka kemiskinan, (4) ketiadaan sarana publik, dan (5) rendahnya interaksi sosial masyarakat. Pemetaan kawasan rawan ini bukan hanya sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi masalah, tetapi juga sebagai panduan untuk menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dalam meminimalisir dampak penyalahgunaan narkoba di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terus ditingkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

## **PENJELASAN JAJARAN PERADILAN SUMATERA UTARA**

### **A)PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN ANGGARAN**

#### *Pagu Anggaran Tahun 2023*

- A. DIPA 01, DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, dengan anggaran sebesar Rp. 37,776,431,000,- , dengan penyerapan hingga November 2023 mencapai Rp. 36,439,839,675,- atau 96,46 %.
- B. DIPA 03, DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum, dengan anggaran sebesar Rp 501.404.000,- dengan penyerapan hingga November 2023 mencapai Rp.490.130,449,- atau 97,75 %.

#### *Pagu Alokasi Tahun 2024*

DIPA 01 : Rp. 39.125.446.000,-

DIPA 02 : Rp. 434.830.000,-

## **PENGAWASAN**

### *Data Perkara*

Dalam penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Penyelesain Perkara nomor 03 tahun 2022 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan umum. Dan dengan adanya aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi Sipp) penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan tepat.

Data Penyelesaian Perkara Tahun 2023 :

1. Pidana : 1729 perkara
2. Perdata : 616 perkara

Total jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan adalah :

- Perkara Pidana dan Pidana Khusus: 51.012 perkara
- Perkara Perdata :7.229 perkara

#### *Data perkara yang dieksekusi dan pengaduan*

Beban eksekusi Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan periode Januari – November 2023 adalah berjumlah 634 perkara; yang sudah terlaksana 160 perkara (25,3%) dan sisa akhir 474 perkara (74,7%).

Terkait penengangan pengaduan, terdapat 910 surat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

#### *Kendala yang Dihadapi*

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Perkara Pidana :

- Kekurangan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sementara perkara banyak yang masuk sehingga terdapat beberapa perkara yang melewati masa waktu dalam proses persidangan
- Permasalahan persidangan secara online dikarenakan jaringan internet yang tidak memadai atau lambat sehingga persidangan tersebut tidak efektif dan efisien secara waktu
- Perangkat persidangan secara elektronik khususnya Lembaga yang menunjang persidangan tersebut seperti Rumah Tahanan tidak memadai khususnya bagi sarana dan prasarannya sehingga persidangan tersebut terlihat seperti bukan di dalam persidangan
- Kekurangan sarana dan prasarana berupa komputer dan printer
- Tuntutan Penuntut Umum sering ditunda karena penuntut umum belum mempersiapkan tuntutannya

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Perkara Perdata :

- Para Pihak Beberapa Kali mengajukan alat bukti tambahan (saksi dan surat)
- Para Pihak Beberapa Kali tidak hadir tanpa laporan

- Sebagian para pihak berada di luar kota.

Kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi :

1. Adanya perlawanan dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali
2. Adanya perdamaian para pihak dalam proses eksekusi namun tidak memberikan laporan.
3. Menunggu kesiapan pihak Kepolisian untuk pengamanan.

## **B)PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN ANGGARAN**

*Pagu dan realisasi Anggaran DIPA tahun 2023*

Pagu DIPA 01 Pengadilan Agama se-Sumatera Utara sebesar Rp. 121.219.892.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 61.628.694.000  
Belanja Barang : Rp. 26.316.499.000  
Belanja Modal : Rp. 33.274.699.000

Realisasi Anggaran DIPA 01 sampai dengan bulan Nopember 2023 sebesar 89,96%.

Selanjutnya, Pagu DIPA 04 Pengadilan Agama se-Sumatera Utara dapat dirinci sebagai berikut :

Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) : Rp.961.900.000  
Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) : Rp.544.840.000  
Biaya Penyelesaian Perkara di luar Gedung : Rp.579.540.000

Realisasi Anggaran DIPA 04 sampai dengan bulan Nopember 2023 sebesar 98,21%.

## **PENGAWASAN**

*Data Perkara*

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan menangani perkara (Tingkat banding) sebanyak 122 perkara (sisa tahun 2021 sebanyak 0 perkara dan diterima tahun 2022 sebanyak 122 perkara), dari 122 perkara tersebut telah diselesaikan sebanyak 106 perkara sehingga prosentase penyelesaian perkara pada tahun 2023 sebanyak 89%.

## Pelaksanaan Eksekusi

Perkara Eksekusi sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan yang diterima selama bulan Januari s.d. November 2023 adalah sebanyak 31 perkara, dengan rincian sebagai berikut : Terlaksana 16 perkara, tidak terlaksana 2 perkara, dan dalam proses 13 perkara.

### *Pengawasan terhadap hakim dan panitera*

Hasil temuan Pengawasan serta Monitoring yang dilakukan oleh Tim PTA Medan terkait pengawasan terhadap perilaku hakim yang bermasalah telah ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Komisi Yudisial. Hal ini terlaksana berkat kerjasama dan kolaborasi pimpinan PTA dengan Komisi Yudisial yang mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan. Sementara pengaduan terhadap perilaku panitera atau pejabat kepaniteraan yang melanggar kode etik panitera belum ada.

### *Upaya Yang Dilakukan Untuk Mendukung Penyelenggaraan Sidang Online (e-Court)*

Jumlah Perkara Yang Terdaftar pada e-Court Tahun 2023 : 6639 Perkara.

Upaya untuk mendukung pelaksanaan sidang online (E-Court)

- a. Pemenuhan sarana sidang online (TV Monitor, Komputer/Laptop, Peralatan teleconference untuk sidang online, dan audio) sesuai dengan standar dekorum ruang sidang.
- b. Jaringan internet yang stabil
- c. Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi

*Hal yang masih menjadi kendala atau hambatan adalah:*

- a. Jaringan internet di daerah tidak stabil;
- b. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan persidangan secara e-court masih tergolong rendah
- c. Tidak semua masyarakat para pencari keadilan yang paham tentang teknologi informasi.

## **C)PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

## ANGGARAN

Pagu Anggaran DIPA tahun 2023

**Tabel 1 Laporan Realisasi Satuan Kerja Sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Per Tanggal 1 Desember 2023**

No	Nama Satuan Kerja	DIPA 01			DIPA 05		
		Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	10.082.117.000	9,451,186,338 (93.74 %)	630.930.662	250.400.000	246,350,699 (98.38 %)	4.049.301
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	8.976.656.000	7,812,034,618 (87.03 %)	1.164.621.382	42.900.000	37,163,000 (86.63 %)	5.737.000
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	5.196.318.000	4,826,955,400 (92.89 %)	369.362.600	36.610.000	27,245,000 (74.42 %)	9.365.000
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	6.512.145.000	5,973,093,121 (91.72 %)	539.051.879	49.323.000	45,382,410 (92.01 %)	3.940.590
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	6.040.471.000	5,791,776,311 (95.88 %)	248.694.689	36.405.000	29,149,100 Pem(80.07 %)	7.255.900
6	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	4.798.535.000	4,317,791,655 (89.96 %)	480.743.345	36.680.000	26,978,000 (73.55 %)	9.702.000

### Anggaran Pembangunan Gedung PTTUN Medan

Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dianggarkan anggaran akan rencana dalam pagu Indikator pada tahun 2024 sebesar Rp19.904.325. yang mana kegiatan tersebut terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

## PENGAWASAN

Data Perkara

**Tabel 1 Data Perkara masuk dan penyelesaiannya**

No	Satuan Kerja	Jumlah Beban Perkara		Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus yang Lewat Batas Waktu	Jumlah Perkara Dalam Proses	Target Kinerja %	Capaian Kinerja %
		Sisa Tahun Lalu	Masuk					
1	PTTUN Medan	42	157	174	7	25	80%	96%
2	PTUN Medan	43	159	156	0	47	100%	100%
3	PTUN Banda Aceh	15	30	35	0	10	100%	100%
4	PTUN Pekanbaru	28	52	55	1	25	75%	98%
5	PTUN Padang	10	31	27	0	14	90%	100%
6	PTUN Tanjung Pinang	5	25	21	1	9	80%	95%

*Pengawasan terhadap hakim dan panitera*

Pada November 2023 terdapat hukuman disiplin terhadap dua hakim pada wilayah satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Terkait koordinasi Komisi Yudisial dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hanya dilakukan dalam sosialisasi rekrutmen Hakim Agung.

*Kendala dalam penyelenggaraan e-court yang perlu menjadi perhatian*

Kendala untuk penyelenggaraan sidang *online* (*e-court*) adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan sidang *online* (*e-court*) masih belum memadai, diantaranya alat *mixer sound system, mic wireless zoom online, kamera zoom online*.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masih disempurnakan dalam melaksanakan *e-court*.

**D)PENJELASAN KETUA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA  
ANGGARAN**

*Pagu dan realisasi Anggaran DIPA tahun 2023*

A. Pengelolaan Keuangan DIPA 01.

a) Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA 01 per November TA 2023 (*dalam satuan Rupiah*).

Uraian	November TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.575.523.000	5.066.176.920	90.86
Belanja Barang	2.539.574.000	2.101.784.410	82.76
Belanja Modal	55.000.000	55.000.000	100
Total Belanja	8.170.097.000	7.222.961.330	88.41

b) Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA 05 per November TA 2023 (*dalam satuan Rupiah*).

Uraian	November TA 2023			
	Pagu	Realisasi	Sisa anggaran	%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan tata Usaha Negara				
Belanja Barang Operasional	486.857.000	413.017.236	73.839.764	84.83



*Rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas TA 2024*

Adapun rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas TA 2024 sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sidang online secara maksimal dengan stakeholder satuan terkait.
3. Perawatan dan pemeliharaan Gedung dan bangunan
4. Pengadaan sarana dan prasarana disabilitas.
5. Peningkatan SDM teknis dengan mengusulkan ke Pusdiklat Menpin Mahkamah Agung RI

**PENGAWASAN**

*Data Perkara*

PERKARA PIDANA  
PADA PENGADILAN MILITER JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN  
BULAN JANUARI S.D NOVEMBER TAHUN 2023

No	Wilayah	Sisa 2022	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	Dilmil I - 01 Aceh	10	87	77	20
2	Dilmil I - 02 Medan	13	102	92	23
3	Dilmil I - 03 Padang	2	73	66	9
4	Dilmil I - 04 Palembang	2	142	121	23
5	Dilmil I - 05 Pontianak	0	56	42	14
6	Dilmil I - 06 Banjarmasin	0	38	35	3
7	Dilmil I - 07 Balikpapan	6	57	50	13

PERKARA MENONJOL  
PADA PENGADILAN MILITER JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN  
BULAN JANUARI S.D NOVEMBER TAHUN 2023

No	Wilayah	Tindak Pidana	%
1.	Dilmil I - 01 Aceh	Desersi	48,27 %
2	Dilmil I - 02 Medan	Desersi	48,5 %
3.	Dilmil I - 03 Padang	Desersi	45,20 %
4	Dilmil I - 04 Palembang	Desersi	28,47 %
5	Dilmil I - 05 Pontianak	Desersi	64 %
6	Dilmil I - 06 Banjarmasin	Desersi	57,9 %
7	Dilmil I - 07 Balikpapan	Desersi	31 %

### *Perkara Menonjol dan Pelaksanaan Eksekusi*

Perkara menonjol pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah tidak pidana desersi.

Terkait pelaksanaan eksekusi, Pembinaan bagi para narapidana militer (Napimil) yang perkaranya di sidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan jajarannya, dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) yang terdekat dengan satuan Napimil yaitu :

- Lemasmil I Medan (Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang)
- Lemasmil II Cimahi (Palembang)
- Lemasmil V Banjar Baru (Pontianak, Banjarmasin dan Balikpapan)

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Militer yang dilaksanakan oleh Oditur Militer (dalam hal ini Oditurat Militer) sebagai berikut :

- Jarak satuan Terpidana dengan satuan Otmil/Otmilti.
- Terbatasnya anggaran perjalanan dinas yang tersedia bagi Terpidana di Oditurat Militer untuk mendukung pengantaran/pengawalan Terpidana dari Otmil/Otmilti ke Lemasmil.
- Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan segera /langsung tetapi dilakukan secara kolektif/bersama-sama.

### *Pelaksanaan Sidang Online*

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara di masa pandemi, Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melaksanakan sidang online dengan berpedoman pada SEMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan sebagai berikut :

- Alat / perangkat yang tidak mendukung pada satuan terkait seperti Otmilti/Otmil, Kumdam, Pom dan Lemasmil setidaknya setara dengan pengadilan.
- Jaringan internet pada satuan terkait setidaknya setara dengan pengadilan.
- SDM / operator satuan terkait yang kurang memahami cara kerja sidang online (virtual), sehingga perlu dilakukan pelatihan.

### C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024 ke Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Sumatera Utara maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kanwil Sumatera Utara Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Militer Tinggi III Medan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dan menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
2. Komisi III DPR RI meminta para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja, serta akan menindaklanjuti kendala dan usulan kebutuhan yang telah disampaikan kepada para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas pelaksanaan kegiatan kamtibmas dan penanganan kasus maupun kesiapan pengamanan dalam menghadapi Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara.
4. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan tindak pidana yang telah dilakukan, serta penerapan *restorative justice* yang baik di Provinsi Sumatera Utara.
5. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mengatasi permasalahan *over-kapasitas* WBP Lapas/Rutan serta mendukung Kebijakan dalam pemenuhan hak WBP terkait Pemilu 2024.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja  
KOMISI III DPR RI,**

**Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.**